

# Sinergitas Dinas Sosial dan Yayasan Sayangi Bali dalam Penanganan Anak Terlantar di Kota Denpasar

Noviana Astrin Dewayanny<sup>1)</sup>, Putu Eka Purnamaningsih<sup>2)</sup>, Putu Nomy Yasintha<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [novianaastrin@gmail.com](mailto:novianaastrin@gmail.com)<sup>1)</sup>, [eka.ningsih81@yahoo.com](mailto:eka.ningsih81@yahoo.com)<sup>2)</sup>,  
[nomyyasintha.unud@gmail.com](mailto:nomyyasintha.unud@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Denpasar city is currently trying to protect neglected children to get the same protection as general children. Therefore, through synergy between Social Service of the Bali Province, Social Service of Denpasar City and Sayangi Bali Foundation are expected to be able to give the best handling for neglected children in the Denpasar City. This research used descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. This research looks how the synergies between Social Service of the Bali Province, Social Service of Denpasar City and Sayangi Bali Foundation in handling neglected children in Denpasar City by using Najiyati's synergy indicators consisting of communication and coordination. The result shows that the synergies it's been going well based on communication and coordination indicators. But there are still a few things need to be improved, so the synergy can run more optimally.*

**Keywords :** Synergy, Neglected Children, Child Protection.

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan dalam rangka menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Isu perlindungan atas hak anak belakangan ini menjadi sorotan, hal ini dikarenakan semakin maraknya permasalahan yang melibatkan dan mengesampingkan hak-hak anak, seperti kekerasan terhadap anak, perdagangan

anak, eksploitasi anak hingga penelantaran anak.

Kota Denpasar sebagai daerah ibukota Provinsi Bali saat ini juga berjuang untuk mengatasi permasalahan balita terlantar. Tercatat dalam Data Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2018, jumlah balita terlantar di Kota Denpasar berjumlah 19 balita, 11 diantaranya laki-laki dan 8 diantaranya perempuan (Dinas Sosial Kota Denpasar, 2019). Penelantaran balita di Kota Denpasar dipicu karena adanya gaya hidup yang bebas sehingga menyebabkan adanya kehamilan tak diinginkan (KTD) ataupun hasil anak diluar nikah. Selain hal tersebut, penelantaran balita yang dilakukan oleh orangtua dipicu karena ketidakmampuan orang tua dalam bidang

ekonomi, dimana biaya hidup yang tinggi tidak selaras dengan pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan permasalahan tersebut, melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya tertuang arahan, landasan serta kepastian hukum, bagi pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak. Diadakannya peraturan tersebut bertujuan guna melindungi hak-hak anak serta memberinya perlindungan hukum yang dapat menjamin keberlangsungan hidup seorang anak. Dalam Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat serta keluarga.

Pemerintah Daerah dalam hal ini kaitannya dengan Dinas Sosial Provinsi Bali serta Dinas Sosial Kota Denpasar sebagai dinas yang bertanggung jawab terkait permasalahan balita terlantar sudah seharusnya menangani permasalahan balita terlantar di Kota Denpasar. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan Yayasan Sayang Bali dalam pengasuhan balita terlantar. Yayasan Sayang Bali berdiri dengan tujuan sosial yakni untuk membantu para balita korban penelantaran orang tua. Melalui Keputusann Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7000, AH.01.04.Tahun 2012 maka pendirian Yayasan Sayang Bali telah disahkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yayasan Sayang Bali berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Bali ditandai dengan terbitnya Surat Tanda

Pendaftaran Nomor: 060.1/38/DINSOS/2015. Dari awal berdirinya pada tahun 2011 hingga saat ini, jumlah balita yang telah diasuh oleh Yayasan Sayang Bali berjumlah 40 balita. Dari jumlah tersebut, 6 balita masih berada dalam pengasuhan. Berdasarkan permasalahan dan fakta yang ditemui dilapangan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sinergitas Dinas Sosial dan Yayasan Sayang Bali dalam Penanganan Anak Terlantar di Kota Denpasar”**

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Najiyati dan Rahmat dalam Bayu (2019) sinergi dapat diartikan sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Menurut Suci (2017) sinergitas dapat dibangun melalui dua cara yaitu :

### **A. KOMUNIKASI**

Komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan stimuli guna mendapat tanggapan ataupun menerima stimuli rangsangan. Penelitian ini menggunakan indikator komunikasi menurut Ruslan (2017) yang terdiri dari: Komunikasi Spesifik, Komunikasi Terukur, Komunikasi Dapat di Capai, Komunikasi Berorientasi Pada Hasil, dan Komunikasi Batasan Waktu. Namun dalam melihat sinergitas ini, peneliti akan menekankan kepada indikator : (1) Komunikasi Spesifik yaitu membuat sasaran merasa diperhatikan secara khusus , artinya mereka mendengarkan informasi dari sumber khusus, pesan khusus, media khusus, dengan efek khusus dalam

konteks khusus pula, (2) Komunikasi Terukur yaitu tujuan komunikasi akan dapat dicapai jika sumber komunikasi telah merumuskan ukuran-ukuran bagi semua elemen dalam proses komunikasinya. Misalnya, terdapat indikator untuk menentukan kelayakan sumber baik tercapainya tujuan komunikasi, indikator atau alat ukur bagi pesan, media, sasaran, efek, dan indikator bagi konteks, dan (3) Komunikasi Berorientasi Pada Hasil, dimana komunikasi haruslah berorientasi pada hasil yang direncanakan sebelumnya.

## B. KOORDINASI

Koordinasi yang baik haruslah dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan suatu ide baru. Menurut Moekijat (1994) menyebutkan terdapat 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu : Hubungan Langsung, Kesempatan Awal, Kontinuitas Koordinasi, Dinamisme, Tujuan yang Jelas, Organisasi yang Sederhana, Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab yang Jelas, Komunikasi yang Efektif dan Kepemimpinan Supervisi yang Efektif. Namun dalam melihat sinergitas ini, peneliti akan menekankan kepada indikator: (1) Hubungan langsung yaitu koordinasi lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung, (2) Kesempatan awal yaitu, koordinasi dapat lebih mudah dicapai dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijakan, (3) Kontinuitas yaitu, koordinasi merupakan suatu proses yang *continue* dan haruslah berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan, (4) Dinamisme yaitu, koordinasi harus terus-menerus diubah mengingat adanya perubahan

lingkungan baik intern ataupun ekstern, (5) Tujuan yang jelas yaitu, dengan adanya tujuan yang jelas penting agar koordinasi dapat berjalan dengan efektif, (6) Organisasi yang sederhana yaitu, struktur organisasi yang sederhana akan memudahkan terciptanya koordinasi yang efektif, (7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas yaitu, wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan, dan (8) Kepemimpinan supervisi yang efektif yaitu, kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi, baik pada tingkat perencanaan ataupun pada tingkat realisasi.

## 3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dimana fokus dalam peneitian ini adalah bagaimana sinergitas diantara Dinas Sosial dan Yayasan Sayangi Bali dalam Penanganan Anak Terlantar di Kota Denpasar. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer (observasi serta wawancara) dan sumber data sekunder (tinjauan pustaka, dokumen dan literatur). Dalam penelitian ini, informan ditentukan oleh penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Sinegitas Dinas Sosial dan Yayasan Sayangi Bali dalam Penanganan Anak Terlantar di Kota Denpasar**

###### **A. KOMUNIKASI**

###### **a. Komunikasi Spesifik**

Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali sudah melakukan komunikasi spesifik didalam komunikasi. Komunikasi ini tercermin dari adanya penyampaian informasi/sosialisasi mengenai bagaimana cara penanganan balita terlantar serta bagaimana proses dan alur prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin melakukan proses pengangkatan anak melalui tatap muka/tatap langsung antara Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali ataupun Yayasan Sayangi Bali dengan masyarakat umum yang memiliki ketertarikan/kepentingan. Selain melalui tatap muka, proses sosialisasi juga dilakukan dengan menyisipkan informasi tersebut pada saat *homevisit* ke rumah COTA (Calon Orang Tua Angkat). Sosialisasi seperti ini dilakukan mengingat adanya keterbatasan anggaran/dana yang menyebabkan Dinas Sosial Kota Denpasar dan Dinas Sosial Provinsi Bali sebagai lembaga pemerintahan belum mampu menyelenggarakan penyampaian informasi/sosialisasi kepada masyarakat di Kota Denpasar secara umum.

###### **b. Komunikasi Terukur**

Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali sudah melakukan komunikasi terukur didalam komunikasi. Dimana dalam melakukan komunikasi, baik Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali tidak memiliki batasan-batasan dalam berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi kepada masyarakat, selagi informasi yang akan disampaikan bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia. Dalam menyampaikan informasi mengenai penanganan serta alur/prosedur pengangkatan anak kepada masyarakat, masing-masing lembaga sudah memiliki wakilnya tersendiri. Penyampaian informasi pada Dinas Sosial Kota Denpasar dan Dinas Sosial Provinsi Bali akan dilakukan oleh bidang rehabilitasi sosial sedangkan pada Yayasan Sayangi Bali penyampaian informasinya akan dilakukan oleh pimpinan yayasan. Namun dengan penyampaian informasi yang demikian dinilai kurang optimal karena terkadang masyarakat harus menunggu pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi terkait.

###### **c. Komunikasi Berorientasi pada Hasil**

Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali sudah melakukan komunikasi berorientasi pada hasil yang sudah direncanakan yakni menciptakan penanganan yang maksimal bagi bayi terlantar dan memberikan pengasuhan terbaik agar hak-hak nya sebagai seorang anak dapat terjamin serta terlindungi. Hal ini tercermin dari bayi yang berada dalam pengasuhan Yayasan Sayangi Bali tumbuh dengan sehat dan baik. Selain itu hasil dari

komunikasi ini juga tercermin dari adanya penurunan angka balita terlantar di Kota Denpasar yang dituangkan dalam Data Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2016-2018. Dimana pada tahun 2016 jumlah balita terlantar di Kota Denpasar berjumlah 56 balita, pada tahun 2017 berjumlah 44 balita sedangkan pada tahun 2018 menurun jumlahnya menjadi 19 balita terlantar. ( Data Dinas Sosial Kota Denpasar, 2018).

## **B. KOORDINASI**

### **a. Hubungan Langsung**

Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali sudah melakukan koordinasi hubungan langsung. Hal ini tercermin dari koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali pada saat penanganan bayi terlantar dilakukan dengan hubungan langsung baik itu melalui tatap muka ataupun melalui teknologi informasi komunikasi (pesan singkat/telfon) antara Ibu Ida Ayu Ketut Anggraeni, S.Sos, M.Si. , Ibu Ni Wayan Rusmini, S.Sos. , Ibu Anak Agung Ayu Diah, SPT., M.Si dan Bapak Dewa Putu Wirata, S.H. Selain antara Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali, koordinasi hubungan langsung juga dilakukan dengan Tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak) dalam proses pengangkatan anak.

### **b. Kesempatan Awal**

Sinergi diantara Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali dalam melakukan koordinasi sudah dilandasi oleh dasar hukum yang menjadi kesempatan awal dari adanya sinergi ini. Adapun beberapa peraturan dan

dasar hukum yakni : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Proses Pengangkatan Anak, Standar Operasional Prosedur Penanganan Balita Terlantar Kota Denpasar, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7000, AH.01.04.Tahun 2012 dan Surat Tanda Pendaftaran Nomor: 060.1/38/DINSOS/2015. Selain beberapa peraturan tersebut, anggaran/pendanaan juga menjadi kesempatan awal dari adanya kerjasama ini. Namun pemerintah terkhusus Dinas Sosial Provinsi Bali belum memiliki anggaran khusus untuk membantu yayasan dalam proses pengasuhan bagi bayi terlantar serta dana operasional bagi Yayasan Sayangi Bali.

### **c. Kontinuitas Koordinasi**

Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali sudah melakukan kontinuitas koordinasi. Dimana koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali, Yayasan Sayangi Bali sudah berjalan dari tahun 2012 hingga saat ini. Koordinasi ini dapat tercermin dari koordinasi yang dilakukan didalam penanganan bayi terlantar yang dimulai dari adanya penemuan balita terlantar - penitipasuhan balita terlantar untuk selanjutnya diasuh dan dirawat di Yayasan Sayangi Bali – persiapan balita untuk selanjutnya menuju proses pengangkatan anak – proses pengangkatan anak – pengawasan (*monitoring*

dan evaluasi) setelah anak ditetapkan oleh pengadilan menjadi anak angkat. Selain melakukan koordinasi berkelanjutan pada saat penanganan bayi terlantar, koordinasi juga akan dilakukan sekalipun tidak terjadi penemuan balita terlantar ataupun tidak ada proses pengangkatan anak.

#### **d. Dinamisme**

Koordinasi yang dinamis telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali. Dimana koordinasi yang dilakukan bersifat fleksibel dan tidak kaku sehingga koordinasi dapat dengan mudah dilakukan pada kondisi yang dinamis. Hal ini tercermin dari pada saat ada kepentingan/keperluan Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali bisa melakukan kunjungan kerja satu sama lain, ataupun bisa berkoordinasi dengan teknologi informasi komunikasi (pesan singkat/telfon). Sikap fleksibilitas yang dilakukan didalam koordinasi ini tidak berlebihan dan mengacu/berpatokan kepada peraturan yang telah ditetapkan.

#### **e. Tujuan yang Jelas**

Koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali telah memiliki tujuan yang bisa dikatakan sangat baik karena mencakup aspek-aspek yang menjadi fokus dari adanya penanganan bayi terlantar yakni menciptakan penanganan yang maksimal bagi bayi terlantar dan memberikan pengasuhan terbaik agar hak-hak nya sebagai seorang anak dapat terjamin serta terlindungi. Usaha untuk pencapaian tujuan tersebut juga telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan

Sayangi Bali dengan cara memberikan penanganan yang cepat serta kehidupan yang lebih layak dengan memberikan pengasuhan di Yayasan Sayangi Bali. Disamping itu masyarakat juga terlibat dalam pencapaian tujuan ini, diantaranya memberikan sumbangan/donasi bagi perawatan bayi di yayasan serta keterlibatan beberapa masyarakat didalam proses pengangkatan anak.

#### **f. Organisasi yang Sederhana**

Organisasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali cenderung kompleks. Hal tersebut dikarenakan Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda. Namun dengan struktur yang demikian, tidak menghambat koordinasi yang dilakukan didalam penanganan bayi terlantar serta prosedur pengangkatan anak. Tidak terganggunya koordinasi ini dikarenakan komunikasi yang baik sudah terjalin diantara lembaga tersebut, selain itu Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali juga tergabung didalam Tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak). Dimana dalam Tim PIPA ( Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak ) Ibu Ida Ayu Ketut Anggraeni, S.Sos, M.Si. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali menduduki jabatan sebagai Ketua Tim PIPA ( Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak ) sedangkan Dinas Sosial Kota Denpasar dan Yayasan Sayangi Bali dalam hal ini berkedudukan sebagai anggota dalam Tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak). Keterlibatan Dinas Sosial Provinsi Bali, Dinas

Sosial Kota Denpasar dan Yayasan Sayangi Bali dalam Tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak) tentunya akan semakin memudahkan koordinasi antara lembaga tersebut didalam penanganan ataupun proses pengangkatan anak.

#### **g. Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab yang Jelas**

Koordinasi yang terjadi diantara Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali sudah memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Dalam kerjasama ini, Dinas Sosial Provinsi Bali memiliki tanggung jawab sebagai pengawas Yayasan Sayangi Bali, baik itu pengawasan untuk kelembagaan maupun kondisi anak yang dititip-asuhkan di Yayasan Sayangi Bali. Selain itu Dinas Sosial Provinsi Bali juga memiliki kewenangan dan tugas untuk membentuk Tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak). Sedangkan Dinas Sosial Kota Denpasar bertugas sebagai badan pemerintahan yang melakukan penanganan pertama apabila terjadi penemuan balita terlantar di kewilayahan Kota Denpasar serta melakukan pengawasan kepada Yayasan Sayangi Bali terkait pengasuhan yang diberikan kepada bayi terlantar. Yayasan Sayangi Bali dalam hal ini bertanggung jawab sebagai mitra pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap balita terlantar khususnya pada saat pengasuhan dan perawatan. Selain itu yayasan juga memiliki tanggungjawab untuk mengawasi dan memantau kondisi balita yang akan melalui proses pengangkatan anak.

#### **h. Kepemimpinan Supervisi yang Efektif**

Kepemimpinan supervisi yang efektif telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, Dinas Sosial Kota Denpasar dan Yayasan Sayangi Bali. Sikap kepemimpinan tersebut dapat tercermin dari sikap para pemimpin yaitu Ibu Ida Ayu Ketut Anggraeni, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali Ibu Anak Agung Ayu Diah, SPT., M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar dan Bali, Bapak Dewa Putu Wirata, S.H selaku Pimpinan Yayasan Sayangi sudah melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing baik itu didalam penanganan balita terlantar ataupun dalam proses pengangkatan anak. Didalam melaksanakan tugasnya mereka mampu mengkoordinasikan anggotanya masing-masing. Selain itu kepemimpinan supervise ini juga tercermin dari sikap tanggung jawab yang dimiliki, dimana mereka sangat bertanggung jawab terhadap informasi yang bersifat rahasia.

### **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Sinergitas Dinas Sosial dan Yayasan Sayangi Bali dalam Penanganan Anak Terlantar di Kota Denpasar dapat dilihat dari 2 sisi yakni dari komunikasi dan koordinasi. Jika di lihat dari komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali maka komunikasi yang terjalin sudah berjalan baik. Dimana dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi (pesan singkat/telfon) maka komunikasi yang dijalankan bisa lebih efektif dan efisien. Sedangkan apabila dilihat dari koordinasi, Dinas Sosial Kota Denpasar, Dinas Sosial

Provinsi Bali dan Yayasan Sayangi Bali juga telah melaksanakan koordinasi dengan baik. Dimana dengan adanya koordinasi ini penanganannya yang diberikan terhadap balita terlantar bisa lebih cepat dan balita juga dapat sesegera mungkin tertangani.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

- |  |   |
|--|---|
| <p>Ahmad Sultra Ruslan dan Nurhakki Hakki. 2017. <i>Pengantar Ilmu Komunikasi</i>. Yogyakarta : Grup Penerbit CV Budi Utama</p> <p>Arif Ghosita, 2004. <i>Masalah Perlindungan Anak</i>. Jakarta. PT Bhuana Ilmu Populer.</p> <p>Arikunto. 2006. <i>Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek</i>. Jakarta : PT. Rineka Cipta.</p> <p>Dwiyanto, Agus. 2005. <i>Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik</i>. Yogyakarta: Gadjah mada University Press</p> <p>Lembaga Administrasi Negara. 2000. <i>Akuntabilitas dan Governance, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</i>. LAN Jakarta.</p> <p>Moleong , Lexy J. 2004. <i>Metodologi Penelitian Kualitatif</i>. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.</p> <p>Sahban Amsal. 2018. <i>Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang</i>. Makassar : Sah Media</p> | <p>Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. <i>Metodelogi Penelitian Kualitatif</i>. Bandung: Penerbit Alfabeta</p> <p>Sugiyono. 2010. <i>Metode Penelitian Kualitatif</i>. Bandung:Alfabeta</p> <p>Sugiyono. 2013. <i>Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&amp;D</i>. Bandung:Alfabeta</p> <p>Tanjung, H. Bahdin dan Ardial, H. 2010. <i>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Proposal, Skripsi, Tesis dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah</i>. Cetakan ke 5. Jakarta:Kencana</p> <p>Thoha Miftah. 2000. <i>Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik</i>. Makalah, Yogyakarta : Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.</p> |
|--|---|

### Buku Online

- Frederickson. GH, dkk. 2012. *The Public Administration Theory*



Primer. Westview Press  
Boulder Colorado.

Wijaya. AF, dkk. 2014. *Manajemen Publik Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.

### Dokumen Pemerintah

*Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

*Rekapan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Denpasar Tahun 2018.*

*Rekapan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali Tahun 2018*

*Undang Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

### Karya Ilmiah dan Jurnal

Bayu. 2019. *Sinergitas Pemerintah Desa Tangkas Kecamatan Klungkung dengan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduse, Reuse, Recycle) Darma Winangun untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kesehatan Lingkungan*. Universitas Udayana. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Firandika, AR. 2017. *Penanganan Anak Terlantar Oleh*

*Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*. Universitas UIN Alauddin Makasar. Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

Ketler S, Sintong. 2014. *Peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2012*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Manggabrani, Andi Mangeppe dkk. 2017. *Synergy of Stakeholders Law No 7 of 2012 Regarding Handling of Social Conflict to Support Social Security Stability*. Jurnal Program Studi Damai dan Resolusi Konflik. Fakultas Keamanan Nasional. Universitas Pertahanan Nasional.

Pranowol, dkk. 2018. *Sinergy The Role of Social Welfare Institution Holders Through Family Care Unit (FCU)*. Jurnal Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) dan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial. Kementerian Sosial.

Rahmawati, Eli Julimas. 2017. *Penelantaran Anak dalam*

*Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)*. Jurnal Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yastimi, Ni Kadek Ayu dkk. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Tukang Suwun Anak di Pasar Badung)*. Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Udayana Provinsi Bali.

Yudho, Lukman. 2007. *Good Governance Resposisi Administrasi Publik Lensa Kapital Sosial*. Jurnal Universitas Merdeka Malang. Program Studi Magister Administrasi Publik

## Sumber Elektronik

Balipost.com. 2018. *Bali Miliki 3000 Anak Terlantar*. Dari <http://www.balipost.com/news/2019/07/21/81415/Bali-Miliki-3.000-Anak-Terlantar.html>. Diakses tanggal 2 September 2019.

DetikNews.com. 2019. *Melahirkan Saat Ujian di Kampus, Mahasiswi ini Tega Membuang Bayinya*. Dari <https://news.detik.com/berita/d-4647844/melahirkan-saat-ujian-di-kampus-mahasiswi-ini-tega-buang-bayinya>. Diakses tanggal 2 September 2019.

Kemendriankesehatan.go.id. 2019. *Kebutuhan Dasar Anak Untuk Tumbuh Kembang yang Optimal*. Dari <http://www.kesmas.kemkes.go.id/portal/konten/~rilis-berita/021113-kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal>. Diakses tanggal 2 September 2019.